

Dewan Kesenian, Mampukah Jawab Apatisme Publik?

Suatu sore di bulan September lima tahun lalu, pernah terjadi obrolan di antara sesama seniman seputar persoalan dunia kesenian, seniman, lembaga kesenian, hingga "dewan kesenian." Di tengah ribetnya alur logika yang berseliweran menafsir hubungan antar satu topik persoalan dengan topik lainnya, tiba-tiba ada yang nyeletuk, "Sudahlah, bicara dewan kesenian, tipis batas antara seniman dan siluman!"

Oleh: IRWASYAH HARAHAP

Konsentrasi pun buyar. Seketika itu pula celetukan tadi disambut gemuruh koor berbau latak, "Ya, bubarkan saja!"

Gambaran sikap apriori terhadap lembaga-lembaga dewan kesenian cukup umum dijumpai di kalangan para seniman di berbagai wilayah Indonesia. Anahnya, hingga hari ini para birokrat dewan kesenian (notabene sebagian besar juga adalah para "seniman"), masih juga terus bersemangat bicara tentang itu? Mengapa?

Logika Pak Belalang

Mungkin kita masih ingat masa subur lembaga-lembaga dewan kesenian di Indonesia terjadi pada era rezim Orde Baru lalu. Lembaga yang inspirasi awalnya bermula di kalangan seniman Jakarta (lewat Dewan Kesenian Jakarta/DKJ) menular ke berbagai tempat-tempat lain di Indonesia.

Tanpa bermaksud mengurangi wibawa para tokoh seniman yang ada di dalamnya, kenyataan membuktikan nyaris tak pernah kita temui gagasan-gagasan cemerlang yang membumi lewat apa yang telah dikerjakan lembaga-lembaga ini. Kecuali, sejauh yang tampak, berbagai aktivitas birokratif seremonial bertamengkan kesenian.

Sebagian kritikus seni malah mengkhawatirkan sejak lama bahwa dewan kesenian-dewan kesenian merupakan kepanjangan tangan birokrasi pemerintah, yang berperan sebagai media *power-controlled* terhadap kehidupan kesenian itu sendiri.

(Radhar Panca Dahana dalam *Kompas*, 1 September 2005 juga mengemukakan kritik yang sama.) Fakta yang juga tak terbantahkan, perpecahan di kalangan seniman sering bukan karena alasan berkesenian, tetapi lebih pada pertengkaran menyangkut kepentingan kekuasaan itu tadi.

Di era Indonesia yang katanya saat ini telah berubah (setidaknya rezimnya), tampak sekali lembaga-lembaga dewan kesenian masih ingin tetap berperan sebagai *watchdog*-nya pemerin-

tah. Forum pertemuan para seniman dan petinggi dewan kesenian se-Indonesia di Jayapura, 22-26 Agustus 2005, memperlihatkan gejala itu. Mereka berkumpul dan seperti biasa mengumbar slogan-slogan politis atas nama kesenian.

Untuk menegaskan itu semua, ditampilkanlah tayangan acara seremonial telekonferens antara para peserta forum dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebegitu pentingkah itu? Cukup beralasan: Mencari legitimasi dari rezim penguasa yang baru.

Yang sedikit absurd dari salah satu butir pernyataan forum adalah asumsi bahwa persoalan "krisis budaya bangsa" penyebabnya karena ketiadaan perhatian terhadap dunia kesenian (?). Menurut saya, tidak ada hubungan korelatif yang rasional antara dunia kesenian Indonesia (kalau asumsinya dianggap sebagai bagian dari budaya bangsa) dengan krisis yang dialami bangsa Indonesia saat ini.

Kehidupan kesenian, baik di kota-kota besar yang lebih didominasi *art-capitalist oriented*, dan di desa-desa yang cenderung lebih *culture festivities*, tidak memperlihatkan sama sekali apa yang dimaksudkan dengan "krisis budaya bangsa."

Dunia kesenian memang punya problemnya sendiri, tetapi menjadi irasional kalau keterabaiannya dijadikan alasan terhadap rusaknya moralitas sebuah bangsa. Untung saja tidak ada pernyataan sikap dari kongres dewan kesenian yang lalu berbunyi, "Dengan berkesenian kita lawan korupsi!" Hipokrisi sikap semacam ini, kelihatan hampir mewarnai segala aspek kehidupan bangsa Indonesia saat ini, sesungguhnya menjadi bagian krisis terbesar dihadapi bangsa ini.

"Fallacy" pemikiran

Dari pengalaman mengikuti dan mengamati berbagai forum dewan kesenian di beberapa tempat di Indonesia, cukup umum ditemui kekeliruan pandangan orang-orang yang terlibat di dalamnya terhadap dunia kesenian. Lebih celaka lagi, pandangan tersebut kelihatannya terus dipercaya, malah sebagian menjadikannya kredito.

Kesalahan berpikir itu di antaranya: (1) institusi yang "mengklaim" dirinya seolah mewakili dunia kesenian itu sendiri; (2) menganggap arah maupun perkembangan dalam dunia kesenian sangat bergantung dari/melalui apa yang mereka anggap penting untuk dikerjakan; (3) dunia kesenian dianggap hanya sebatas "dunia kreativitas seni" *ansich*; (4) persoalan ke-